

Upaya Bendahara Lembaga Pemasyarakatan dalam Menyikapi Budaya Korupsi di Masyarakat

Ghofar Syafri Hudzaifi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen,
Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: ghofar221995@gmail.com

Abstract. *The culture of corruption that is pervasive in Indonesian society presents major challenges for Correctional Institutions, especially in maintaining financial integrity. The prison treasurer has a strategic role in responding to this phenomenon through a series of steps such as implementing a transparent financial management system, increasing strict internal supervision, and regular training for employees regarding ethics and integrity. Apart from that, community involvement and collaboration with external institutions are also needed to strengthen accountability and ensure that efforts to eradicate corruption are effective. Through a comprehensive and collaborative approach, prisons strive to create an environment that is clean and free from corruption. These efforts are not only focused on internal reform, but also on strengthening relations between government institutions, civil society and the private sector, in order to build a system that is more accountable and has high integrity. In the midst of existing progress, significant challenges still hinder this effort, but multidimensional efforts are expected to provide long-term positive impacts.*

Keywords: *anti-corruption; financial; treasurer; young generation*

Abstrak. Budaya korupsi yang meresap dalam masyarakat Indonesia memberikan tantangan besar bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), khususnya dalam menjaga integritas keuangan. Bendahara Lapas memiliki peran strategis dalam menyikapi fenomena ini melalui serangkaian langkah seperti penerapan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, peningkatan pengawasan internal yang ketat, dan pelatihan berkala bagi para pegawai terkait etika dan integritas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan kerjasama dengan lembaga eksternal juga diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas dan memastikan upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif. Melalui pendekatan komprehensif dan kolaboratif, Lapas berupaya menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada reformasi internal, tetapi juga pada penguatan hubungan antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, serta sektor swasta, guna membangun sistem yang lebih akuntabel dan berintegritas tinggi. Di tengah kemajuan yang ada, tantangan yang signifikan masih menghambat upaya ini, namun upaya multidimensi diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang.

Kata Kunci: anti korupsi; bendahara; keuangan; generasi muda

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan isu mendasar yang mengancam integritas dan stabilitas sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut Fakhruddin (2020), korupsi tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam menghadapi tantangan ini, penegakan hukum anti-korupsi menjadi suatu keharusan. Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada regulasi dan mekanisme hukum, tetapi juga pada konteks budaya hukum yang ada dalam masyarakat.

Budaya hukum di Indonesia memiliki karakteristik yang unik, dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, tradisi, dan norma-norma yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Fakhruddin mengemukakan bahwa budaya hukum yang kuat dan positif dapat berfungsi sebagai

penghalang bagi praktik korupsi. Sebaliknya, budaya yang lemah dan permisif justru membuka jalan bagi terjadinya tindakan koruptif. Oleh karena itu, memahami budaya hukum adalah langkah awal yang penting dalam upaya penegakan hukum anti-korupsi.

Dalam konteks institusional, penting untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Ini termasuk penguatan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memerlukan dukungan dari semua sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Kerja sama antar institusi juga sangat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Fakhruddin bahwa tanpa adanya kolaborasi yang solid, upaya penegakan hukum akan berjalan di tempat (Fakhruddin, 2020).

Selain itu, pendidikan anti-korupsi perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal maupun informal. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas mengenai dampak korupsi dan pentingnya integritas. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda. Dengan memperkenalkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini, diharapkan akan tercipta generasi yang lebih peduli terhadap isu ini.

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam pembentukan karakter dan integritas generasi penerus bangsa. Dalam konteks Indonesia, di mana korupsi masih menjadi tantangan serius, pendidikan anti-korupsi semakin mendesak untuk diimplementasikan. Artikel yang ditulis oleh Asan et al. (2024) berjudul "Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa" memberikan analisis mendalam mengenai upaya pendidikan dalam menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, generasi muda kini menghadapi beragam tantangan moral dan etika yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Pengaruh lingkungan sosial, budaya pop, dan media sosial dapat dengan mudah mengikis nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pegangan setiap individu. Oleh karena itu, pendidikan perlu mengambil peran yang lebih proaktif dengan tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai integritas dan anti-korupsi ke dalam kurikulum. Ini merupakan langkah fundamental dalam membangun karakter yang kuat, sehingga generasi muda mampu menghadapi godaan dan tantangan yang ada di masyarakat.

Asan et al. mengidentifikasi berbagai strategi yang dapat diadopsi dalam pendidikan untuk membangun integritas anti-korupsi. Beberapa strategi tersebut mencakup pelatihan berbasis nilai yang menekankan pentingnya moralitas, pengembangan kurikulum yang inklusif dan relevan, serta keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Keterlibatan ini menjadi penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pendidikan anti-korupsi dan memupuk kesadaran di kalangan siswa tentang pentingnya integritas sebagai bagian dari karakter mereka.

Namun, implementasi strategi ini tidaklah tanpa tantangan. Artikel ini dengan jelas menyoroti sejumlah hambatan, seperti kurangnya sumber daya yang memadai, resistensi dari berbagai pihak yang mungkin tidak memahami urgensi pendidikan anti-korupsi, serta perlunya dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius agar pendidikan anti-korupsi tidak hanya menjadi jargon, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan memperhatikan berbagai dimensi ini, Asan et al. tidak hanya memberikan gambaran tentang pentingnya pendidikan dalam membangun karakter generasi penerus, tetapi juga menawarkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan tersebut. Menghadapi masalah korupsi secara proaktif melalui pendidikan adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan komitmen dari semua pihak—guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya siap secara akademis, tetapi juga berintegritas dan berkomitmen untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik (Hasan, Z, 2024).

Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi menjadi landasan yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang bersih, adil, dan beretika. Proses pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai integritas bukan hanya akan menghasilkan individu-individu yang cerdas, tetapi juga pemimpin masa depan yang mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa. Dengan demikian, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga merupakan sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan, di mana generasi penerus dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung kejujuran, keadilan, dan transparansi.

Korupsi telah menjadi salah satu masalah paling mendalam yang menghambat kemajuan masyarakat dan pembangunan di berbagai negara. Dalam konteks Indonesia, budaya korupsi yang telah mengakar di berbagai sektor menjadi tantangan serius bagi upaya penegakan hukum dan pembangunan integritas. Artikel oleh Rohman, Syah, dan Jayadihati (2023) berjudul "Building an Anti-Corruption Legal Culture" menggambarkan pentingnya

membangun budaya hukum yang menolak korupsi sebagai langkah fundamental dalam menciptakan masyarakat yang bersih dan transparan.

Penulis menyoroti bahwa pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat perlu diprioritaskan, sehingga nilai-nilai integritas dapat terinternalisasi dalam setiap individu. Penerapan sanksi yang tegas juga harus dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan holistik yang diusulkan tidak hanya mengandalkan tindakan hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang esensial dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang budaya hukum anti-korupsi, diharapkan generasi mendatang dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi. Membangun budaya ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik, di mana integritas dan kejujuran menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan. Rasa optimisme dan harapan ini penting, karena menciptakan budaya anti-korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tugas bersama setiap anggota masyarakat. Setiap langkah yang diambil menuju perubahan ini akan berkontribusi pada terciptanya masa depan yang lebih cerah dan adil bagi semua.

2. METODE

Dalam penelitian ini, kami mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menganalisis Upaya budaya dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas isu korupsi, dengan mempertimbangkan perspektif budaya hukum yang telah dibahas oleh Syamsudin (2016). Proses penelitian dimulai dengan studi pustaka yang menyeluruh, di mana kami mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan mengenai korupsi dan budaya hukum. Langkah ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual yang solid sebagai dasar analisis. Selanjutnya, kami melakukan analisis terhadap sejumlah kasus korupsi yang signifikan, yang dipilih berdasarkan dampak sosial dan efektivitas dalam pencegahan korupsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya bendahara lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam menyikapi budaya korupsi di masyarakat merupakan isu yang sangat krusial dan mendesak, terutama di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang di Indonesia. Dalam konteks globalisasi yang semakin mendalam, pengaruh luar tidak hanya merubah cara hidup, tetapi juga dapat mengancam nilai-nilai lokal yang telah mengakar kuat dalam masyarakat (Rohman, F. I., 2023). Budaya korupsi yang telah menjadi masalah sistemik menuntut perhatian serius dan tindakan

konkrit dari semua pihak, terutama dari lembaga pemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab besar dalam rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Artikel oleh Hasan et al. (2024) menggambarkan bagaimana globalisasi berpotensi mengikis identitas budaya lokal dan nilai-nilai Pancasila, yang seharusnya menjadi fondasi moral dalam setiap kebijakan publik.

Korupsi sering kali dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan individu, namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Seperti yang dinyatakan oleh Syamsudin (2016), tindakan korupsi merupakan refleksi dari sistem hukum dan budaya yang lemah. Dalam konteks ini, bendahara Lapas memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan lingkungan yang menolak korupsi. Tanggung jawab bendahara tidak hanya terletak pada pengelolaan keuangan, tetapi juga pada bagaimana mereka mempengaruhi budaya organisasi dan perilaku pegawai lainnya (Syamsudin, M, 2016). Membangun kesadaran tentang pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan adalah langkah pertama yang krusial. Dalam hal ini, penguatan etika kerja di Lapas sangat penting, di mana bendahara sebagai pilar utama diharapkan mampu menginspirasi pegawai lain untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.

Salah satu langkah awal yang dapat diambil oleh bendahara adalah menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan. Proses audit internal secara berkala harus menjadi rutinitas yang tidak hanya formalitas, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun budaya kejujuran di lingkungan Lapas. Audit ini bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lembaga. Dengan audit yang transparan, masyarakat dapat melihat bahwa ada pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, dan ini dapat menjadi langkah yang efektif dalam membangun reputasi Lapas di mata publik.

Lebih dari itu, pelatihan berkelanjutan mengenai etika dan pengelolaan keuangan menjadi sangat penting untuk membekali pegawai Lapas dengan pengetahuan dan kesadaran akan tanggung jawab mereka. Melalui pelatihan ini, pegawai diharapkan tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga menyadari pentingnya integritas dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Dengan menciptakan budaya yang menolak korupsi, Lapas dapat mulai membangun fondasi yang kuat untuk pengelolaan yang lebih baik. Selain itu, pendidikan tentang dampak negatif dari korupsi pada masyarakat juga penting, sehingga setiap pegawai menyadari bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar masalah pribadi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sebagaimana dibahas oleh Wachid, menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi antara KPK dan bendahara Lapas sangat penting untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan keuangan di lembaga tersebut dilakukan dengan baik dan benar. Dukungan dari lembaga penegak hukum mencakup tidak hanya pengawasan, tetapi juga memberikan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan menegaskan bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Dengan langkah ini, diharapkan Lapas dapat menjadi contoh lembaga yang bersih dan berintegritas.

Namun, penegakan hukum yang efektif tidak cukup jika tidak diimbangi dengan budaya organisasi yang mendukung pelaporan dan transparansi. Penelitian oleh Asan et al. (2023) menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi pegawai Lapas untuk melaporkan potensi penyimpangan tanpa rasa takut akan pembalasan. Oleh karena itu, pelatihan tentang hak dan kewajiban hukum bagi pegawai sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang perlunya melaporkan praktik-praktik korupsi yang mereka temui. Menciptakan saluran pelaporan yang mudah diakses dan terpercaya akan sangat membantu dalam mengurangi rasa takut dan meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap sistem yang ada.

Lebih jauh lagi, bendahara Lapas juga perlu mengambil inisiatif untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, termasuk masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan di Lapas sangat penting untuk meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas lembaga. Melalui program-program edukasi yang melibatkan komunitas, bendahara dapat menyebarluaskan nilai-nilai kejujuran dan transparansi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari korupsi. Masyarakat yang aktif terlibat dalam proses pengawasan akan berfungsi sebagai kontrol sosial yang kuat, yang pada gilirannya mendorong lembaga untuk lebih bertanggung jawab.

Salah satu tantangan utama dalam upaya ini adalah mengubah mindset pegawai Lapas dan masyarakat yang mungkin telah terjebak dalam budaya korupsi. Pendidikan yang berkelanjutan, kampanye kesadaran publik, dan dialog terbuka dapat membantu merombak pemahaman tentang korupsi dan pentingnya integritas. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa tindakan korupsi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan menciptakan ketidakadilan yang lebih luas. Kesadaran akan dampak jangka panjang dari korupsi ini harus ditanamkan dalam setiap lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga orang

dewasa, agar mereka memahami bahwa kejujuran dan integritas adalah nilai yang harus dijunjung tinggi. (Hasan, Z., 2023)

Dalam konteks globalisasi, pengaruh budaya asing sering kali membawa nilai-nilai baru yang dapat menggantikan norma-norma tradisional. Oleh karena itu, bendahara Lapas perlu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan Pancasila ke dalam praktik pengelolaan mereka. Dengan cara ini, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi hukumnya, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat menginspirasi masyarakat untuk berperilaku lebih etis dan bertanggung jawab. Integrasi nilai-nilai ini menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan moral dan etika.

Inovasi dalam pengelolaan keuangan di Lapas juga tidak boleh diabaikan. Penggunaan teknologi informasi dan sistem digital yang transparan dapat membantu memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. Dengan memanfaatkan teknologi, bendahara dapat menyediakan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan, serta mempermudah proses pelaporan kepada masyarakat. Sistem berbasis teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Lapas. Adopsi teknologi ini juga membuka kesempatan untuk mendidik pegawai tentang pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan lembaga.

Sebagai langkah lanjutan, bendahara Lapas harus mampu menciptakan budaya inovasi di lingkungan kerja mereka. Ini mencakup pengembangan aplikasi atau sistem manajemen keuangan yang dapat diakses secara transparan oleh publik. Dengan adanya sistem seperti itu, masyarakat dapat secara langsung melihat bagaimana dana dikelola, serta memberikan umpan balik terhadap praktik-praktik yang ada. Inisiatif ini tidak hanya akan memperkuat transparansi, tetapi juga akan mendorong pegawai untuk bekerja lebih keras dalam menjaga integritas dan reputasi lembaga.

Sebuah pendekatan holistik yang mencakup seluruh aspek organisasi Lapas diperlukan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Ini termasuk reformasi struktural yang dapat mendukung kebijakan anti-korupsi dan memperkuat integritas lembaga. Dengan memperkuat kebijakan dan regulasi yang ada, Lapas dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk pengelolaan yang etis dan bertanggung jawab. Reformasi ini perlu melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pegawai Lapas, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Di sisi lain, penting juga untuk menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara bendahara Lapas dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum-forum terbuka atau dialog publik, masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan harapan mereka terhadap lembaga. Interaksi ini tidak hanya menciptakan keterbukaan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan. Ketika masyarakat merasa terlibat, mereka lebih cenderung untuk berkontribusi dalam upaya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas.

Kesimpulannya, upaya bendahara Lapas dalam menyikapi budaya korupsi harus melibatkan pendekatan multidimensional yang mencakup pendidikan, penegakan hukum, dan kolaborasi lintas sektoral. Dengan memanfaatkan nilai-nilai lokal dan Pancasila sebagai fondasi, bendahara dapat membantu menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel (Hasan, Z, 2024).

Ini bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang bertanggung jawab.

Dengan langkah-langkah konkret dan komitmen yang kuat, diharapkan Lapas dapat menjadi contoh lembaga yang berkomitmen terhadap integritas dan kejujuran. Membangun kesadaran kolektif di antara pegawai dan masyarakat tentang pentingnya etika dan integritas adalah langkah awal yang sangat penting. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung moralitas dan etika yang lebih tinggi, lembaga pemasyarakatan dapat berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat.

Pada akhirnya, tindakan bersama dari seluruh elemen masyarakat adalah kunci untuk mengatasi tantangan korupsi yang selama ini mengganggu kemajuan bangsa. Setiap individu, baik pegawai maupun masyarakat, harus memiliki peran aktif dalam mengawasi dan menegakkan nilai-nilai yang baik. Membangun kesadaran kolektif dan memupuk rasa saling percaya akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang lebih baik dan lebih adil. Dengan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, diharapkan kita dapat mengatasi tantangan korupsi yang selama ini mengganggu kemajuan bangsa, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral dan etika yang lebih baik di masa depan.

Sejalan dengan itu, penting juga untuk menekankan bahwa penguatan sistem pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi pilar yang tak terpisahkan dalam misi melawan korupsi. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini akan membantu membentuk karakter generasi mendatang. Melalui pendidikan yang baik, kita tidak hanya menciptakan individu yang kompeten secara akademis, tetapi juga individu yang memiliki moral dan etika yang kuat, siap menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati diri dan integritas.

Dengan langkah-langkah komprehensif ini, diharapkan lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai lembaga yang mendidik dan membina narapidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermartabat. Oleh karena itu, semua upaya ini perlu dilakukan secara konsisten dan terintegrasi, agar tercipta perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam menghadapi budaya korupsi yang telah mengakar di masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan korupsi yang kompleks, penting untuk menyadari bahwa perubahan yang diharapkan tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Ini adalah proses yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan komitmen dari semua pihak. Edukasi tentang nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab harus menjadi agenda utama yang dilakukan secara berkelanjutan (Santoso, L, 2015). Kesadaran kolektif tentang pentingnya tindakan anti-korupsi harus ditanamkan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki komitmen moral yang kuat.

Di sisi lain, penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi kebijakan serta praktik yang ada di lembaga pemasyarakatan. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga independen akan menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa bendahara dan pegawai lainnya beroperasi dalam koridor yang benar. Dengan adanya sistem pelaporan yang aman dan transparan, setiap individu akan merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam menjaga integritas lembaga.

Tidak kalah pentingnya adalah pembentukan budaya organisasi di dalam Lapas itu sendiri. Budaya yang mendorong keterbukaan, kerjasama, dan tanggung jawab harus diupayakan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Ketika pegawai merasa bahwa mereka bekerja dalam lingkungan yang mendukung etika dan integritas, maka mereka akan lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Dengan upaya-upaya yang terencana dan terpadu, lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga menjadi pendorong perubahan sosial yang positif. Upaya ini tentu tidak hanya akan membawa manfaat bagi lembaga itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan menciptakan sistem yang menolak korupsi, kita dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan yang lebih baik.

Budaya hukum adalah fondasi yang memengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi dengan hukum. Dalam konteks pemberantasan korupsi, penguatan budaya hukum yang positif dapat menjadi senjata ampuh melawan praktik-praktik yang merugikan. Penekanan Lestari tentang pentingnya budaya hukum mengingatkan kita bahwa untuk mengubah mindset masyarakat, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Bendahara Lapas perlu menjadi teladan, menunjukkan bahwa integritas dan kejujuran adalah nilai yang harus diutamakan.

Penguatan sistem internal di Lapas merupakan langkah awal yang krusial. Bendahara harus memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dikelola dengan transparan dan akuntabel. Ketika laporan keuangan disusun dengan jelas, masyarakat akan lebih percaya bahwa anggaran digunakan dengan bijak. Kegiatan audit yang rutin bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga integritas lembaga. Melalui langkah-langkah ini, bendahara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kejujuran.

Membangun budaya organisasi yang menolak korupsi adalah tantangan besar yang dihadapi bendahara. Namun, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung integritas, bendahara dapat mendorong pegawai untuk melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan. Ketika pegawai merasa dihargai atas tindakan etis mereka, akan timbul rasa bangga dan komitmen untuk menjaga reputasi lembaga. Budaya organisasi yang positif bukan hanya menciptakan keamanan, tetapi juga kepercayaan di antara pegawai.

Masyarakat juga memiliki peran krusial dalam mengawasi pengelolaan Lapas. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, bendahara dapat menyebarluaskan nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Ketika masyarakat merasa memiliki andil, mereka akan lebih berkomitmen untuk menjaga integritas lembaga. Masyarakat yang teredukasi akan lebih kritis terhadap praktik-praktik korupsi dan berani menyuarakan pendapat mereka.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks dan beragam, yang dapat mengancam eksistensi identitas budaya lokal serta memperburuk praktik korupsi, Indonesia perlu mengadopsi langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan menyeluruh. Setiap elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, hingga individu, memainkan peran krusial dalam menciptakan perubahan yang diharapkan. Pertama-tama, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya lokal menjadi hal yang sangat penting. Dengan merancang kurikulum yang menonjolkan nilai-nilai budaya dan Pancasila, kita dapat memastikan bahwa generasi muda tidak hanya memahami, tetapi juga menghargai dan mencintai warisan budaya mereka.

Hal ini akan membantu mereka membentuk identitas yang kuat di tengah arus globalisasi yang sering kali homogeny (Dewi, N. A, 2022).

Saran

1. Pengembangan Kurikulum yang Inklusif Sekolah dan universitas perlu merancang kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter, budaya lokal, dan pendidikan anti-korupsi di semua tingkatan. Ini penting untuk membantu siswa memahami dan menghargai warisan budaya serta nilai-nilai Pancasila.
2. Pendidikan Berbasis Proyek Metode pembelajaran berbasis proyek harus diadopsi untuk melibatkan masyarakat dalam pelestarian budaya dan pencegahan korupsi. Melalui proyek-proyek ini, siswa dapat mendapatkan pengalaman langsung dan merasa lebih terhubung dengan komunitas mereka.
3. Pelatihan untuk Guru Mengadakan pelatihan bagi guru agar mereka dapat mengajarkan nilai-nilai budaya dan integritas secara efektif. Pelatihan ini harus mencakup teknik pengajaran yang inovatif dan menarik, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif.
4. Kampanye Kesadaran Publik Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan pelestarian budaya. Penggunaan media sosial dan platform digital sangat penting untuk menjangkau generasi muda dan mendorong partisipasi aktif.
5. Forum Dialog Terbuka: Membentuk forum-dialog antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mendiskusikan isu-isu terkait korupsi dan pelestarian budaya. Forum ini akan memungkinkan pertukaran ide dan pencarian solusi bersama.
6. Penguatan Lembaga Penegak Hukum Mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan transparan. Ini termasuk memberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk mendukung penegakan hukum yang adil.
7. Program Pertukaran Budaya Selenggarakan program pertukaran budaya antar daerah untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Program ini akan membantu membangun solidaritas antar komunitas dan memperkaya pengalaman siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. A., & Dedi. (2022). Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Justicia*, 1(1). ISSN: 2964-5107.
- Fakhrudin. (2020). Perspektif budaya hukum dalam perkembangan kasus korupsi di Indonesia. Dalam *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(1), 185-196.
- Hasan, Z., Annisa, I., Hafizha, A. R., & Nurhalizah, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan di bawah umur. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2).
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 73-82.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.
- Lestari, N. (n.d.). Budaya hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun*.
- Rohman, F. I., Syah, A. T., & Jayadihati, P. A. (2023). Building an anti-corruption legal culture. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Special Issue*, 1-10. P-ISSN: 2442-5303, E-ISSN: 2549-9874.
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal [Nama Jurnal]*, 5(1). Universitas Airlangga.
- Syamsudin, M. (2016). Korupsi dalam perspektif budaya hukum. *Unisia*, 64, 183–194.
- Wachid, M. A. (n.d.). Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang*.